

**KELEMBAGAAN MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA
BARAT (MRP-PB) DALAM OTONOMI KHUSUS TAHUN 2017**

TESIS



Disusun Oleh :

YAMIN RENGEN

20141040007

**PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017**

**KELEMBAGAAN MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA
BARAT (MRP-PB) DALAM OTONOMI KHUSUS TAHUN 2017**

TESIS

“Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Memperoleh Gelar dalam Magister Ilmu Pemerintahan”



Disusun Oleh :

YAMIN RENGEN

20141040007

**PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017**

PENGESAHAN PEMBIMBING

**KELEMBAGAAN MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA
BARAT (MRP-PB) DALAM OTONOMI KHUSUS TAHUN 2017**

TESIS

**YAMIN RENGEN
20141040007**

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Dyah Mutiarin, M.Si

Yogyakarta, 30 Desember 2017

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Dyah Mutiarin, M.Si
NIK : 19711108201004 163 089

PENGESAHAN REVISI

Telah melaksanakan ujian tesis pada hari Sabtu, Tanggal 30 Desember 2017, Jam 09.00, bertempat di Gedung Pascasarjana Lantai I Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk diberikan persetujuan revisi tesis, oleh :

Ditulis Oleh : YAMIN RENGEN

NIM : 20141040007

Tesis Berjudul : **KELEMBAGAAN MAJELIS RAKYAT PAPUA
PROVINSI PAPUA BARAT (MRP-PB) DALAM
OTONOMI KHUSUS TAHUN 2017**

Dosen Pembimbing : Dr. Dyah Mutiarin, M.Si (.....)

Tim Penguji I : Dr. Ulung Pribadi, M.Si (.....)

Tim Penguji II : Dr. Zuly Qodir (.....)

PENGESAHAN PROGRAM STUDI

Tesis Berjudul : **KELEMBAGAAN MAJELIS RAKYAT PAPUA
PROVINSI PAPUA BARAT (MRP-PB) DALAM
OTONOMI KHUSUS TAHUN 2017**

Ditulis Oleh : Yamin Rengen

NIM : 20141040007

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Dalam Magister Ilmu Pemerintahan**

Yogyakarta, 30 Desember 2017

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Dyah Mutiarin, M.Si
NIK : 19711108201004 163 089

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yamin Rengen

NIM : 20141040007

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul “ **Kelembagaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (Mrp-Pb) Dalam Otonomi Khusus Tahun 2017** ” adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran.

Yogyakarta, 30 desember 2017

Yang Membuat Pernyataan



Yamin Rengen

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis bisa merasakan nikmat kesehatan dan semangat yang luar biasa. Penulis hanturkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dosen pembimbing Bapak. Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc dan Terima Kasih pengetahuan dan dedikasi serta bantuan yang selama ini banyak membantu penulis.
2. Dosen pembimbing Ibu Dr. Dyah Mutiarin, M.Si sekaligus Ketua Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih banyak atas kesabaran dan arahannya yang telah diberikan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan tesis.
3. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Keluarga tercinta Rengen dan istri tercinta Aradia Weripih sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. dan segenap pemerintah kabupaten Fak-Fak serta MRP Papua Barat yang telah banyak membantu penulis.

Yogyakarta, 19 Desember 2017

Penulis
Yamin Rengen

ABSTRAK

Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) di Papua Barat memiliki peran yang penting dalam upaya melindungi hak-hak politik asli orang Papua berdasarkan nilai-nilai adat yang menjadi kesepakatan orang asli Papua dalam membangun Papua. Secara jelas bahwa dalam pembuatan Perdasus tetap memperhatikan hak-hak dasar orang asli Papua seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008. Hal ini terbukti ketika secara regulatif MRP Papua Barat memiliki peran yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan dibentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua berdasarkan penghormatan terhadap adat dan budaya setempat. Kemudian secara normatif dorongan MRP kepada pengurus partai adalah meinta agar memprioritaskan orang asli Papua dalam Caleg priode 2014-2019. Sementara dari aspek MRP memiliki agenda program seperti Rekonsiliasi, Agen Pengawal pembangunan dan Penguatan Lembaga Adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MRP memiliki pandangan yang kuat untuk melindungi masyarakat asli Papua baik dalam menunjang pembangunan maupun perbaikan Good Governance karena hal ini terbukti dengan memprioritaskan orang asli Papua. Namun dalam pelaksanaannya juga bahwa secara kelembagaan di MRP masih lema hal ini bisa dibuktikan ketika masih terjadi konflik di tataran pengurus MRP yang walaupun sejauh ini MRP sudah maksimal mempertahankan nilai-nilai adat yang menjadi kesepakatan semua suku yang ada di Papua. Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah bahwa perlu ada semacam regulating yang kuat

yang berupa surat mandate dari setiap kepala suku sebagai bentuk kepercayaan terhadap suku-suku yang diwakili sehingga tidak terulang konflik yang berkepanjangan dari internal MRP dan membentengi lembaga dari nuasa politik yang tinggi.

Kata Kunci : *Otsus, New Institutional, MRP*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN REVISI	iii
PENGESAHAN PROGRAM STUDI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	10
I.3 Tujuan Penelitian.....	10
I.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
II.1 Tinjauan Pustaka	12
II.2 Kerangka Teori.....	20
II.3 Kerangka Berpikir.....	33
II.4 Definisi Konseptual.....	34
II.5 Definisi Oprasional	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
III.1 Jenis Penelitian.....	40
III.2 Tempat dan Waktu Penelitian	40
III.3 Subjek Penelitian.....	41
III.4 Tehnik Pengumpulan Data	42
III.5 Keabsahan Data.....	43
III.6 Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	47
IV.1 Deskripsi Wilayah Papua Barat.....	47
1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Daerah Papua Barat	47
2. Kondisi Demografis	48
3. Kondisi Demokratis	50
IV.2 Otonomi Khusus Papua.....	51
IV.3 Kelompok Jabatan Fungsional MRP	53

BAB V TEMUAN DAN ANALISIS	59
V.1 Kewenangan MRP Papua Barat dalam Tata Kelola Pemerintahan	61
V.2 Faktor- Faktor Yang mempengaruhi pelaksanaan MRP dalam memperkuat tatakelola pemerintahan di Provinsi Papua Barat..	96
BAB VI PENUTUP	98
VI.1 Kesimpulan	98
VI.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Instrumen Kelembagaan.....	32
Tabel 2.2 Operasional Penelitian	37
Tabel 3.1. jenis dan sumber data	41
Tabel. 5.1 dasar hukum dasar Hukum Kewenangan MRP Papua Barat	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka berpikir Penelitian.....	34
Gambar 4.1. Wilayah Adminsitration Daerah Papua Barat.....	47
Gambar 5.1 Sistem Relasi MRP dengan DRPP Papua Barat dan Gubernur Papua Barat.	80
Gambar 5.2 MRP dalam Good Governance di Papua Barat	95